

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penulisan Hukum*, CV Bandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikat & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

Soekidjo Notoadmojo, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Citra, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. SUMBER LAIN

Achmad Yudha Yogaswara, 2019, '*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Dasar*', Jurnal Ilmu Hukum, Volume 07, Nomor 09 2019.

Debora, Martono Agusti, 2018, '*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan*', Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 03 Desember 2018.

<https://www.aturtoko.id/en/blog/management/marketing/apa-yang-dimaksud-dengan-kemasan-fungsi-tujuan-dan-jenisnya#:~:text=KBBI,Philip%20Kotler%20dan%20Gary%20Armstrong>
Diakses Pada 14 Oktober 2022.

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses pada 21 Oktober 2022 Pukul 16.10

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada 9 Desember

2022. Siti Febrina Sari, 2015, *'Upaya Perlindungan Konsumen*

Terhadap Produk

Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota Pontianak', Program Strata 1 Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *'Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen'*, Jurnal Ilmiah Advokasi Hukum, Volume 6, Nomor 1 2018.